



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NANDANG HARIS**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**
3. NHK : **189914**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.322.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 467 m2/174 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 942.500.000
2. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 67.200.000
3. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.500.000
4. Tanah Seluas 5250 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/57 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.042.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 84.600.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 512.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 235.120.650**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	530.734.703
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.600.155.353
III. HUTANG	Rp.	153.294.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.446.861.353

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.